



KKP
2026
#GROW STRONGER

panganbiru

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II DIREKTORAT IKAN AIR LAUT TAHUN 2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Laut, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Laut. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 16 Juli 2026

Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Ikhsan Kamil, S.T., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan	11
1.3. Tugas dan Fungsi.....	11
a. Sumber Daya Manusia	13
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	13
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Budidaya	16
2.2. Sasaran Kegiatan	16
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2026	16
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja Ikan Air Laut	22
SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	23
IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT .	23
IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT	26
IKSK 3. Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT	29
IKSK 4. Produksi Benih Kepiting di UPT	32
IKSK 5. Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT	34
IKSK 6. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	36
IKSK 7. Benih Kepiting Yang Disalurkan ke Masyarakat	38
IKSK 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	41
IKSK 9. Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT	44
IKSK 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun	46
IKSK 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	47
IKSK 12. Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR Yang Diuji	50
IKSK 13. Kawasan Budi Daya Lobster Yang Dibangun Atau Direvitalisasi	54

IKSK 14. Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB, CPIB).....	55
IKSK 15. Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya	58
SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	59
IKSK 16. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut	59
IKSK 17. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut	62
IKSK 18. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut	64
IKSK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut.....	69
IKSK 20. Persentase Layanan Perkantoran	71
IKSK 21. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP	73
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	75
BAB IV. PENUTUP	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut	12
Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang Pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026	13
Gambar 3. Potensi Perikanan Budi Daya.....	14
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	17
Gambar 5. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Triwulan II Tahun 2026	20
Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2025	76

D A F T A R T A B E L

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	21
Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT	23
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional pada tiap UPT	24
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT .	27
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT	29
Tabel 6. Realisasi Produksi Benih Ikan Air Laut Kepiting di UPT Tahun 2026	30
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Kepiting di UPT	33
Tabel 8. Realisasi Produksi Benih Kepiting di UPT Tahun 2026	33
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT	34
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat .	36
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat	37
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Benih Kepiting yang Disalurkan ke Masyarakat	39
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	41
Tabel 14. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan II Tahun 2026	42
Tabel 15. Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel)” Berdasarkan Ruang Lingkup Triwulan II Tahun 2026	43
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Monitoring Produksi Pakan Alami UPT	45
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun	46
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	48
Tabel 19. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji di UPT DJPB Triwulan II Tahun 2026	49
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang Diuji	51
Tabel 21. Rincian Target dan Realisasi Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Triwulan II Tahun 2026 di 4 UPT-DJPB	52
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Lobster Yang Dibangun atau Direvitalisasi	54

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB, CPIB)	56
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya	58
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut	60
Tabel 26. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2026	61
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut	63
Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut..	68
Tabel 29. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026	69
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut	70
Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran	72
Tabel 32. Kegiatan Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026	72
Tabel 33. Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP	74

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Tahun 2026, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut.

Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026:

a) Terdapat 11 (sebelas) Indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya telah melampaui target triwulan yang ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut, dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu: (i) produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT (ekor), (ii) produksi calon induk unggul kepiting di UPT (ekor), (iii) produksi benih ikan air laut di UPT (ekor), (iv) produksi benih kepiting di UPT (ekor), (v) benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor), (vi) benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat, (vii) sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel), (viii) sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji (sampel), (ix) sampel surveillance AMU/AMR yang diuji (sampel).

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker direktorat ikan air laut (Persen) dan (ii) indeks profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut.

b) Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) monitoring produksi pakan alami di UPT dan (ii) unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CBIB, CPIB).

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: (i) persentase layanan perkantoran (Persen).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 52,38% Indikator Kinerja telah melampaui dan mencapai target triwulan yang ditetapkan dan 14,28% Indikator Kinerja yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori **“ISTIMEWA”** dengan nilai

111,28. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT (Ekor)**, telah diproduksi calon induk unggul ikan air laut di UPT sebanyak 2.292 ekor di BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok;
2. **IKU 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT (Ekor)**, telah diproduksi calon induk unggul kepiting sebanyak 1.888 ekor di UPT BBPBAP Jepara;
3. **IKU 3. Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT (Ekor)**, telah diproduksi benih ikan air laut di UPT sebanyak 466.066 ekor di BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, BPBL Ambon dan BPIU2K Karangasem
4. **IKU 4. Produksi Benih Kepiting di UPT (Ekor)**, telah diproduksi benih kepiting sebanyak 86.503 ekor di UPT BBPBAP Jepara;
5. **IKU 5. Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT**, belum ada capaian untuk produksi ikan konsumsi air laut di UPT BPBAP Situbondo;
6. **IKU 6. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih ikan air laut sebanyak 1.706.800 ekor oleh beberapa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu: BBPBL Lampung, BPBAP Ujung Batee, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPIU2K Karangasem, BPBAP Takalar dan BPBL Batam;
7. **IKU 7. Benih Kepiting Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih kepiting sebanyak 300.000 ekor oleh BPBAP Takalar;
8. **IKU 8. Sampel Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)**, telah dilakukan pelayanan pengujian parameter penyakit ikan air laut sebanyak 1.285 sampel di beberapa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok;
9. **IKU 9. Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT (Laporan)**, telah dibuat laporan monitoring produksi pakan alami di UPT sebanyak 2 laporan;
10. **IKU 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut yang Disusun (Rekomendasi Kebijakan)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja kebijakan tata Kelola bidang budi daya ikan air laut.
11. **IKU 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel parameter penyakit ikan air laut sebanyak 249 sampel di BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPBL Ambon;
12. **IKU 12. Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel monitoring Surveillance AMR sebanyak 146 sampel di beberapa laboratorium UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Lombok dan BPBL Batam;

13. **IKU 13. Kawasan Budi Daya Lobster yang Dibangun atau Direvitalisasi (Unit)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi.
14. **IKU. 14 Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB, CPIB) (Unit)**, telah dilakukan usaha yang dilakuan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut kepada sebanyak 60 unit usaha perikanan budi daya;
15. **IKU 15. Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya;
16. **IKM 16. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)**, telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap temuan dan saran dari LHP Itjen oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut pada periode triwulan II Tahun 2026 sehingga mendapatkan capaian presentase rekomendasi hasil pengawasan sebesar 100%;
17. **IKM 17. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut;
18. **IKM 18. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)** telah didapatkan nilai indeks sebesar 78,60 pada indikator kinerja penilaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut;
19. **IKM 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut;
20. **IKM 20. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)**, telah dilaksanakan penilaian layanan perkantoran di Direktorat Ikan Air Laut dan mendapatkan nilai persentase sebesar 100%;
21. **IKM 21. Persentase Penyelesaian penyusunan SOP (Persen)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja persentase penyelesaian penyusunan SOP di Direktorat Ikan Air Laut.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan target kinerja tahun 2026, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

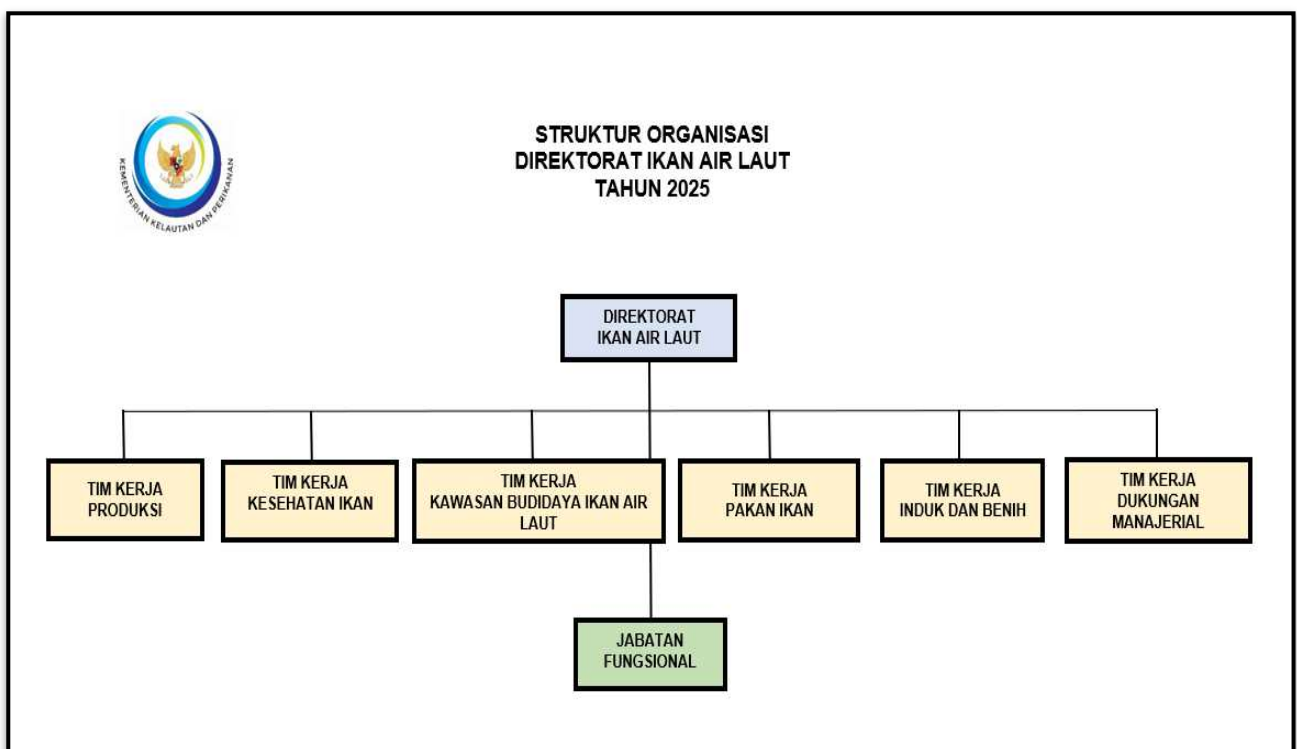
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Laut selama tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tugas Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

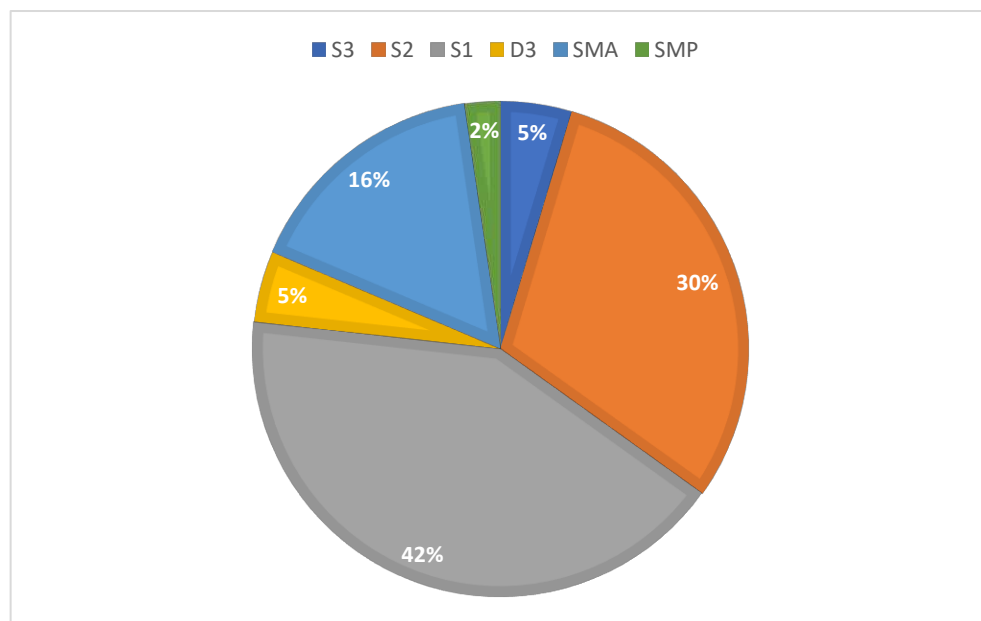
- 1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 5%, S2 sebanyak 30%, S1 sebanyak 42%, D3 sebanyak 5%, SMA sebanyak 16% dan SMP sebanyak 2%.



Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026

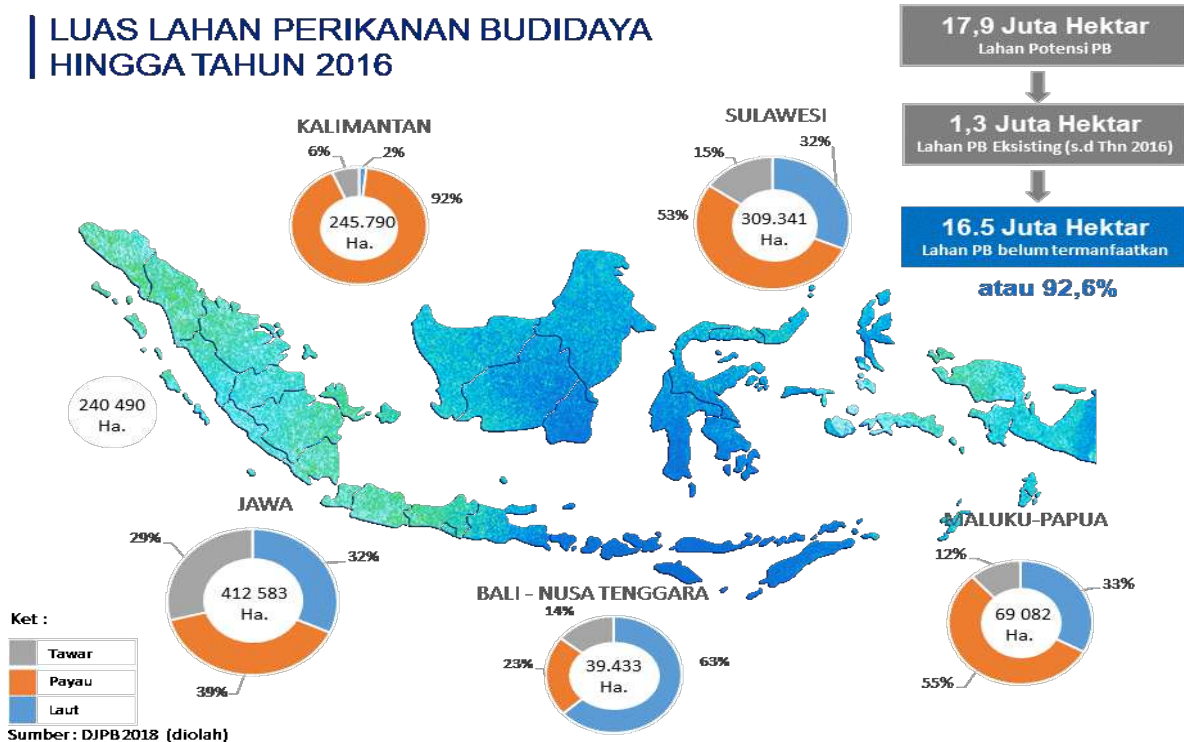
Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Ikan Air Laut mencapai 42 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil 31 orang,
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 7 orang dan
- PPPK Paruh Waktu 2 orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat

terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



Gambar 3. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut 2026 selama kurun waktu April - Juni 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Ikan Air Laut triwulan II tahun 2026. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 telah diterbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Terkait dengan program pembangunan perikanan budi daya, KKP memiliki beberapa rencana kegiatan antara lain produksi benih dan induk unggul, produksi pakan ikan, pembinaan sertifikasi subsektor pembudidayaan ikan, monitoring residu, penyakit ikan, dan pemantauan resistensi anti mikroba, pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis klaster, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan benih dan calon induk ikan, pengelolaan irigasi tambak partisipati (PITAP). Klaster Kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, dan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP).

2.2. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2026. Sasaran Kegiatan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 adalah Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Kamil
Jabatan : Direktur Ikan Air Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT (ekor)	5.612
		2. Produksi calon induk unggul kepiting di UPT (ekor)	5.747
		3. Produksi benih ikan air laut di UPT (ekor)	773.771
		4. Produksi benih kepiting di UPT (ekor)	341.622
		5. Produksi ikan konsumsi air laut di UPT (kg)	25.000
		6. Benih ikan air laut yang disalurkan ke Masyarakat (ekor)	4.560.469
		7. Benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	448.658
		8. Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	1.842
		9. Monitoring produksi pakan alami di UPT (laporan)	4
		10. Kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut yang disusun (rekomendasi kebijakan)	3
		11. Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji (sampel)	340
		12. Sampel monitoring surveillance AMU/AMR yang diuji (sampel)	216
		13. Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi (unit)	1
		14. Unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB, CBIB) (unit)	200
		15. Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya (orang)	500
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut (persen)	86
		17. Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (nilai)	84,2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut (indeks)	81,5
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut (nilai)	81
		20. Persentase layanan perkantoran (persen)	100
		21. Persentase penyelesaian penyusunan SOP (persen)	100

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	403.744.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	183.142.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026		586.886.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



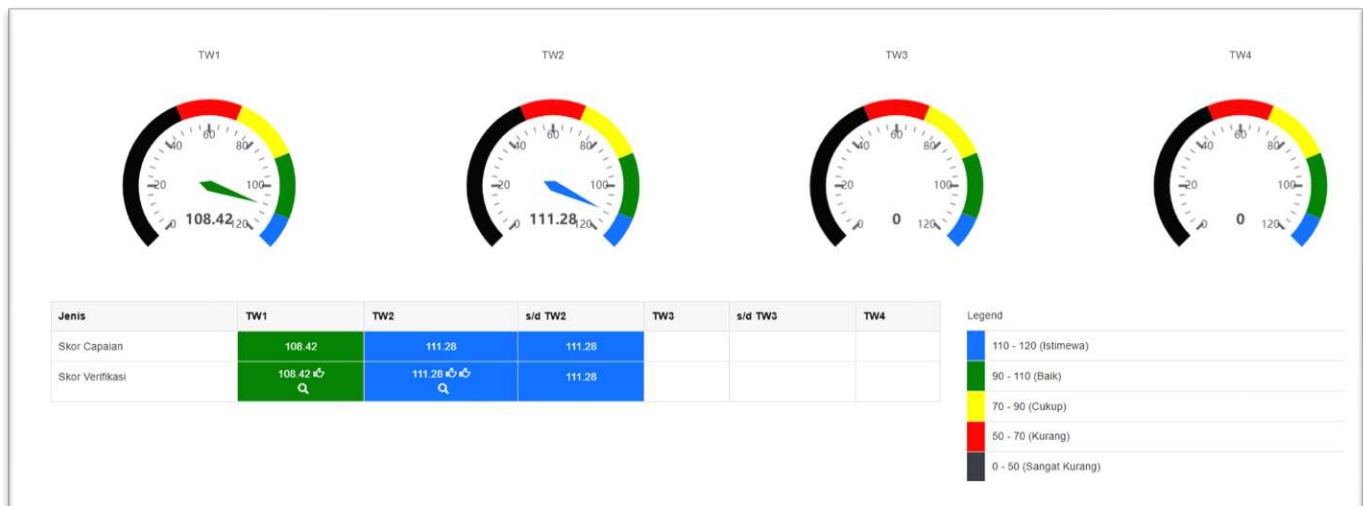
Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 5. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerja Triwulan II Tahun 2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembudidayaan Ikan Air Laut pada tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 6 (enam) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 14 (empat belas) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Periode Pelaporan	Target TW II	Realisasi TW II	%
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT (ekor)	5.612	Triwulan	1.565	2.292	146,45
		2) Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT (ekor)	5.747	Triwulan	1.800	1.888	0,00
		3) Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT (ekor)	773.771	Triwulan	331.501	466.066	140,59
		4) Produksi Benih Kepiting di UPT (ekor)	341.622	Triwulan	85.406	86.503	101,28
		5) Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT (Kg)	25.000	Triwulan	0	0	0,00
		6) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	4.560.469	Triwulan	1.162.195	1.706.800	146,86
		7) Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	448.658	Triwulan	246.762	300.000	121,57
		8) Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan (sampel)	1.842	Triwulan	941	1.285	136,56
		9) Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT (Laporan)	4	Triwulan	2	2	100,00
		10) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	3	Tahunan	0	0	0,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2026	Periode Pelaporan	Target TW II	Realisasi TW II	%
		11)	Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	340	Triwulan	175	249	142,29
		12)	Sampel monitoring surveillance AMU/AMR yang diuji (Sampel)	216	Triwulan	117	146	135,85
		13)	Kawasan Budi Daya Lobster yang dibangun atau direvitalisasi (Unit)	1	Tahunan	0	0	0,00
		14)	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya ikan air laut (CBIB dan CPIB) (Unit)	200	Triwulan	60	60	100,00
		15)	Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	500	Tahunan	0	0	0,00
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	16)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	86	Triwulan	86	100,00	116,28
		17)	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84,2	Tahunan	0	0	0,00
		18)	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)	81,5	Semesteran	74,00	78,60	106,22
		19)	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	81	Tahunan	0	0	0,00
		20)	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100	Triwulan	100	100	100,00
		21)	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP (Persen)	100	Tahunan	0	0	0,00

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan budi daya yang berkelanjutan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 15 Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT

Salah satu target capaian kinerja yang dikelola oleh Timja Induk dan Benih pada Direktorat Ikan Air Laut yaitu produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT. Metode perhitungan indikator ini berfokus pada posisi akhir yakni jumlah produksi calon induk unggul ikan air laut ukuran minimal 300 gram yang dihasilkan baik untuk internal maupun PNBP oleh Unit Pelaksana Teknis. Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBAP Situbondo, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon.

Target indikator kinerja calon induk unggul ikan air laut di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 5,612 ekor sedangkan untuk target triwulan I yaitu 410 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2026 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
2.869	10.462	5.612	1.565	2.292	146,45	40,84

Pada tabel diatas realisasi pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT mencapai 1.565 ekor dari target Tahunan yakni 5.612 ekor. Pada penghitungan realisasi capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT mencapai 146,45% jika dibandingkan dengan target tw II dan mencapai 40,84% dibandingkan dengan target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target produksi calon induk unggul untuk operasional UPT telah terpenuhi dan melampaui target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT pada TW II tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TW II Tahun 2025. Penurunan realisasi dari TW II tahun 2025 ke TW II Tahun 2026 adalah sebesar 577 ekor atau sebesar 79,89% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026. Namun secara target TW II Tahun 2026 sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi dan capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut masing-masing UPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi dan capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional pada tiap UPT

No	Nama UPT Ditjen PB	Target Ekor		Realisasi Triwulan II	Prosentase (%)	
		Tahunan	Triwulan II		Tahunan	Triwulan II
1	BBPBL Lampung	250	0	0	0	0
2	BPBL Batam	1.115	615	1.137	101,97	184,88
3	BPBAP Situbondo	915	0	0	0	0
4	BPBL Lombok	1.665	650	720	43,24	110,77
5	BPBL Ambon	1.667	300	435	26,09	145,00
TOTAL		5.612	1.565	2.292	40,84	146,45

Hasil evaluasi pada triwulan II pada indikator kinerja adalah calon induk unggul ikan air laut di UPT sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian triwulan II yang melebihi target yang sudah ditetapkan. Pada poin 1 diatas capaian triwulan II pada calon induk unggul ikan air laut pada 5 satker yaitu 2,292 ekor. Capaian tertinggi yaitu pada satker BPBL Batam dengan total 1,137 ekor. Pada capaian tersebut komoditas calon induk unggul yang dibudi dayakan oleh BPBL Batam yaitu bawal bintang total 1,107 ekor dan ikan hias total 30 ekor. Pada satker BPBL Ambon capaian produksi calon induk unggul yaitu 435 ekor yang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya dengan komoditas yang dibudidayakan kakap putih 325 ekor dan clownfish 110 ekor. Sedangkan pada BPBL Lombok memiliki capaian 720 ekor yang mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan sebelumnya, dimana produksi calon induk unggul ikan air laut yaitu pada komoditas abalone 280 ekor, ikan hias 130 ekor, tiram mutiara 260 ekor, dan lobster 50 ekor. Sedangkan pada

satker BBPBL Lampung dan BPBAP Situbondo masih proses pemeliharaan budidaya ikan, dimana realisasi akan diakumulasi pada triwulan IV. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB yang melaksanakan indikator produksi calon unggul ikan air laut di UPT telah melaksanakan rencana aksi dengan baik, sehingga pada triwulan II dapat tercapai target yang telah ditentukan.

Kendala atas rencana aksi pada satker/UPT yang menjalankan operasional di lapangan terdapat beberapa kendala. Pada BBPBL Lampung kendala yang di hadapi yaitu tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) yang fluktuatif; potensi serangan penyakit, baik yang bersifat parasitik, bakteri, maupun viral, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kualitas ikan; kualitas lingkungan perairan, seperti perubahan suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan parameter lainnya yang dapat mempengaruhi performa pertumbuhan dan kesehatan ikan; dan keterbatasan pakan berkualitas atau efisiensi pemberian pakan, yang dapat berdampak pada laju pertumbuhan dan keseragaman ukuran ikan. Kendala pada BPBAP Situbondo yaitu cuaca dingin yang menyebabkan nafsu makan ikan budi daya menurun sehingga pertumbuhan tidak maksimal.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut atas indikator kinerja calon induk unggul ikan air laut di UPT terdapat beberapa solusi dan aksi yang telah dilaksanakan. Pada BBPBL Lampung tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu melakukan rekapitulasi dan monitoring pada data ketersediaan calon induk di KJA (data jumlah dan ukuran) pada perubahan kendala tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) yang fluktuatif; melakukan secara berkala pemeriksaan penyakit oleh tim Kesehatan ikan dan lingkungan pada kendala potensi serangan penyakit, baik yang bersifat parasitik, bakteri, maupun viral, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kualitas ikan; melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala untuk memonitoring kualitas lingkungan perairan, seperti perubahan suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan parameter lainnya yang dapat mempengaruhi performa pertumbuhan dan kesehatan ikan, sehingga akan cepat dilakukan penanganan apabila terjadi kondisi yang tidak baik; dan memberikan pakan mandiri berkualitas hasil produksi internal BBPBL Lampung pada kendala adanya efisiensi anggaran. Tindak lanjut pada BPBL Batam yaitu melanjutkan pemeliharaan budi daya ikan bawal bintang dan ikan hias untuk memenuhi target pada triwulan selanjutnya. Tindak lanjut yang dilakukan oleh BPBL Situbondo yaitu telah dilakukan pemeliharaan calon induk kakap putih dengan hasil sampling sebanyak 1.300 ekor ukuran 200 gr.

Rekomendasi periode selanjutnya atas indikator kinerja calon induk unggul ikan air laut di UPT pada beberapa satker terdiri dari BBPBL Lampung yaitu meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan budidaya secara berkala; melaksanakan pemantauan kesehatan ikan dan

tindakan pencegahan penyakit secara rutin; mengoptimalkan manajemen pakan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan; melakukan seleksi calon induk secara bertahap sesuai standar teknis yang berlaku; dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi agar kegiatan pemeliharaan dapat berjalan sesuai rencana. Pada BPBL Batam rekomendasi yang diberikan yaitu melanjutkan proses produksi sampai ukuran 500 gram. Pada BPBAP Situbondo yaitu melanjutkan proses pemeliharaan calon induk dengan pemberian pakan secara lebih intensif.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp. 48,690.000 (84,83%) dari pagu Rp 57.397.000
- BPBAP Situbondo: Rp. 109.278.900 (52,04%) dari pagu Rp 210.000.000 (ada blokir Rp. 90.000.000)
- BPBL Ambon: Rp. 186.145.600 (48,62%) dari pagu Rp 382.841.000
- BPBL Batam: Rp. 144.529.775 (42,37%) dari pagu Rp 341.105.000
- BPBL Lombok: Rp. 54.556.500 (14,27%) dari pagu Rp 382.213.000

Total anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator calon induk unggul ikan air laut di UPT adalah sebesar Rp. 543.200.775,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.373.556.000,- atau mencapai 39,55% anggaran terserap.

IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT

Salah satu indikator kinerja di Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Induk dan Benih adalah produksi calon induk unggul kepiting di UPT. Indikator ini berfokus pada pembesaran kepiting menjadi calon kepiting yang dihasilkan untuk penjualan PNBP dan internal, selain itu juga hasil akhir calon induk kepiting akan digunakan untuk produksi benih kepiting oleh Unit Pelaksana Teknis. Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, dan BPBAP Takalar.

Target indikator kinerja produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 5,747 ekor dan pada triwulan II total target yaitu 1,800 ekor.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi calon induk unggul kepiting di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	100	5.747	1.800	1.888	32,85	104,89

Pada data diatas Realisasi triwulan II indikator kinerja produksi calon induk unggul kepiting di UPT mencapai 1,888 ekor, dimana realisasi tersebut oleh satker BPBAP Situbondo. Prosentase pada triwulan II mencapai 104.89% dan tahunan mencapai 32.85%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi calon induk unggul kepiting di UPT merupakan indikator yang diukur tahunan pada tahun 2025, sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi dan kendala atas indikator kinerja produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada triwulan II mencapai 1,888 ekor. Hasil capaian tersebut diperoleh dari satker BPBAP Situbondo. Pada satker BBPBAP Jepara dan BPBAP Takalar belum ada realisasi karena masih dalam proses produksi calon induk unggul kepiting. Pelaksanaan indikator kinerja sudah berjalan dengan baik, sehingga tercapainya target triwulan II yang sudah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan produksi calon induk kepiting pada BPBAP Situbondo yaitu adanya pencemaran dari limbah pabrik kulit melalui dua sungai yang mengapit kawasan MBK, sehingga proses produksi terganggu dari pencemaran sumber air media pemeliharaan; terpal HDPE pelapis tanggul banyak yang terhempas efek badai angin utara yang cukup kencang; dan kualitas bibit kroyo kurang baik dan mahal serta sulit didapat karena bersaing dengan pabrik pengolahan kepiting kupasan di Jawa Tengah. Pada BPBAP Takalar kendala yang dihadapi yaitu perbedaan ukuran individu akibat variasi laju pertumbuhan sehingga menyebabkan ketidakhomogenan ukuran calon induk pada saat pemeliharaan; potensi kanibalisme masih terjadi terutama pada saat kepiting mengalami proses molting, sehingga meningkatkan risiko kehilangan individu apabila shelter tidak tersedia dalam jumlah yang memadai; terpal HDPE pada beberapa petak pemeliharaan mengalami kebocoran, yang mengakibatkan penurunan volume air dan berpotensi mengganggu kestabilan media pemeliharaan; dan debit air yang

masuk ke kolam belum maksimal, sehingga proses pergantian air dan pemeliharaan kualitas air belum berlangsung secara optimal.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Pada beberapa kendala yang dihadapi oleh satker di lapangan dilakukan tindak lanjut dalam pengelolaan budi dayanya, dimana BPBAP Situbondo melakukan mangement, penebaran, pemeliharaan, pemberian pakan serta perawatan pada biota calin kepiting dengan pencatatan harian sehingga monitoring pada biota dapat tertata dan terukur normal; melakukan pengadaan bibit kroyo ukuran 50 gr sebanyak 52.000 ekor. Pada BPBAP Takalar melakukan tindak lanjut yaitu melaksanakan *grading* (sortasi ukuran) secara berkala untuk memisahkan kepiting/rajungan berdasarkan ukuran sehingga mengurangi persaingan memperoleh pakan dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih seragam; menambah jumlah shelter pada wadah pemeliharaan serta meningkatkan frekuensi pemantauan terutama pada periode molting untuk menekan tingkat kanibalisme; melakukan penambalan dan perbaikan terpal HDPE yang bocor serta pemeriksaan kondisi terpal secara rutin untuk mencegah kebocoran yang lebih luas; mengoptimalkan suplai air melalui pembersihan saluran pemasukan air, pengaturan distribusi air ke kolam pemeliharaan, serta koordinasi dengan pengelola sarana agar debit air dapat memenuhi kebutuhan pemeliharaan; dan melakukan monitoring kualitas air secara rutin meliputi suhu, salinitas, pH, dan oksigen terlarut guna menjaga kondisi lingkungan tetap sesuai untuk pertumbuhan calon induk.

Rekomendasi atas indikator kinerja produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada triwulan II pada BPBAP Situbondo yakni pemanfaatan sumur bor yang ada di kawasan tambak pemeliharaan serta optimalisasi kolam tandon dengan penyaringan dan filterisasi berlapis menggunakan pompa elektrik; segera melakukan perbaikan terpal HDPE pelapis tanggul; dan menggunakan bibit dari luar kota dengan lebih selektif dan menggunakan bibit crablet produksi pembenihan MBK. Pada satker BPBAP Takalar rekomendasi yang dilakukan yaitu melaksanakan *grading* secara terjadwal agar keseragaman ukuran kepiting/rajungan dapat dipertahankan selama masa pemeliharaan; menambah jumlah shelter sesuai dengan kepadatan pemeliharaan untuk meminimalkan kanibalisme, terutama pada saat kepiting mengalami molting; melakukan penggantian terpal HDPE yang telah mengalami kerusakan berat dan menyusun jadwal inspeksi sarana secara berkala untuk mencegah kebocoran; meningkatkan kapasitas sistem penyediaan air, baik melalui perbaikan jaringan perpipaan, pompa, maupun saluran distribusi sehingga kebutuhan debit air selama pemeliharaan dapat terpenuhi secara optimal; dan meningkatkan monitoring dan pencatatan pertumbuhan, sintasan, dan kualitas air sebagai dasar evaluasi teknis untuk perbaikan manajemen produksi pada siklus berikutnya.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPAP Jepara: Rp. 18.717.980 (48,73%) dari pagu Rp 38.411.000
- BPBAP Situbondo: Rp. 607.879.244 (66,89%) dari pagu Rp 908.800.000
- BPBAP Takalar: Rp. 0 (0%) dari pagu Rp 19.767.000

Total anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator calon induk unggul kepiting di UPT adalah sebesar Rp. 626.597.224,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 978.273.000,- atau mencapai 64,05% anggaran terserap.

IKSK 3. Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT

Salah satu target capaian kinerja yang dikelola oleh Timja Induk dan Benih pada Direktorat Ikan Air Laut yaitu produksi benih ikan air laut di UPT. Metode perhitungan pada indikator ini yaitu posisi akhir yakni jumlah benih yang dihasilkan untuk penjualan PNBP dan untuk dipelihara menjadi calon induk oleh Unit Pelaksana Teknis. Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBAP Situbondo, BPBL Takalar, BPBL Lombok, BPBL Ambon, dan BPIU2K Karangasem.

Target indikator kinerja produksi benih ikan air laut di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 773.771 ekor dengan target untuk triwulan II yaitu 331.501 ekor.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi benih ikan air laut di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	0	773.771	331.501	466.066	140,59	60,23

Pada data diatas capaian indikator kinerja produksi benih ikan air laut di UPT mencapai 466,066 ekor dengan prosentase tahunan yaitu 60.23% dan prosentase triwulan II yaitu 140.59%. Secara capaian indikator produksi benih ikan air laut di UPT sudah mencapai target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi benih ikan air laut di UPT merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja produksi benih ikan air laut pada triwulan II menunjukkan hasil yang sangat signifikan melampaui target periodik yang telah ditetapkan.

Tabel 6. Realisasi Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT Tahun 2026

No	Nama UPT Ditjen PB	Target Ekor		Realisasi Triwulan II	Prosentase (%)	
		Tahunan	Triwulan II		Tahunan	Triwulan I
1	BBPBL Lampung	162.436	50.000	59.889	36,87	119,78
2	BPBL Batam	58.001	25.001	42.250	72,84	168,99
3	BPBAP Situbondo	416.667	183.500	201.290	48,31	109,69
4	BPBAP Takalar	30.000	12.000	23.000	76,67	191,67
5	BPBL Lombok	30.000	12.000	53.000	176,67	441,67
6	BPBL Ambon	46.667	35.000	72,437	155,22	206,96
7	BPIU2K Karangasem	30.000	14.000	12.000	47,33	101,43
TOTAL		773.771	331.501	466.066	60,23	140,59

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja produksi benih ikan air laut pada triwulan II menunjukkan hasil yang sangat signifikan melampaui target periodik yang telah ditetapkan. Pencapaian melampaui target dimana realisasi total pada Triwulan II mencapai 466,066 ekor, atau sebesar 140.59% dari target triwulan yang dipatok sebesar 331,501 ekor. Hingga akhir Juni 2026, total progres terhadap target tahunan sudah mencapai 60.23%, yang berarti on-track untuk mencapai target kumulatif di akhir tahun. Keberhasilan ini didorong oleh kualitas produksi yang optimal, khususnya pada aspek *Survival Rate* (SR) yang tinggi, *Hatching Rate* (HR) yang maksimal, serta tingkat fekunditas induk yang sangat baik, sehingga output benih per siklus melebihi estimasi awal. Performa masing-masing satker

yakni BPBL Lombok menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 53,000 ekor (capaian 441.67% dari target TW II). BPBL Lombok dan BPBL Ambon mencatatkan lonjakan persentase yang sangat masif terhadap target triwulan tahunan. BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBAP Situbondo, dan BPBL Takalar menunjukkan performa luar biasa dengan realisasi yang bahkan sudah melampaui target triwulan masing-masing (119.78%, 168.99%, 109.69%, dan 191.67%). Sedangkan satker BPIU2K Karangasem memiliki capaian paling rendah diantara satker yang lain.

Meskipun secara angka statistik menunjukkan hasil yang melampaui target, terdapat beberapa catatan teknis dan kendala yang dihadapi di lapangan diantaranya BBPBL Lampung yaitu tingkat kelangsungan hidup larva yang relatif rendah pada fase awal, mengingat fase larva merupakan tahap yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan; keterbatasan ketersediaan pakan alami, seperti fitoplankton dan zooplankton yang sangat dibutuhkan pada fase awal pemeliharaan larva; dan potensi serangan penyakit baik yang disebabkan oleh bakteri maupun parasit yang dapat menghambat keberhasilan produksi sejak tahap awal. Pada BPBAP Situbondo yaitu belum maksimalnya produksi benih karena kondisi cuaca yang dingin dengan suhu berkisar antara 26-28° di media pemeliharaan larva dengan suhu ideal 29-32°. Perubahan suhu di lapangan yang berubah secara signifikan merupakan tantangan dalam proses budi daya. Fluktuasi suhu dan faktor lingkungan ini sangat memengaruhi stabilitas operasional pembenihan. Terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi parameter biologis (SR dan HR) agar tetap stabil di tengah tantangan iklim, guna memastikan target pada triwulan berikutnya tidak mengalami penurunan. Pada BPIU2K Karangasem yaitu saat ini sedang berlangsung proses pembangunan yang dibiayai ADB pada unit kekerangan sehingga proses pemeliharaan dan pemijahan biota terganggu yang disebabkan oleh terbatasnya ruangan yang dapat digunakan sebagai tempat pemeliharaan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Triwulan II, tindak lanjut yang dapat dilakukan pada BBPBL Lampung yakni pada teknik pemeliharaan larva dilakukan pengaturan suhu di bak pemeliharaan dengan pemberian tutup terpal/plastik pada permukaan bak pemeliharaan dan penggunaan heater; menjamin ketersediaan pakan alami secara berkelanjutan, baik melalui kultur *phytoplankton* dan *zooplankton* yang merupakan pakan alami dalam proses pemeliharaan benih ikan laut; dan monitoring kualitas air pada *hatchery* produksi benih ikan laut. Pada BPBAP Situbondo yaitu sudah dilaksanakan produksi benih kakap putih sejumlah 20.000 ekor (3.500 ekor untuk PNBP, 1.500 ekor untuk calin, 15.000 untuk internal tuban), benih kerapu cantang sebanyak 181.290 ekor (15.000 ekor untuk bantuan, 20.000 ekor untuk kegiatan budi daya di Instalasi Tuban, 146.290 ekor untuk PNBP). Pada BPIU2K Karangasem yaitu menjaga lingkungan sekitar tempat pemeliharaan dan pemijahan agar layak dan sesuai dengan yang dipersyaratkan

agar terhindar dari kontaminasi.

Rekomendasi atas kendala rencana aksi pada periode selanjutnya pada BBPBL Lampung yaitu mempertahankan kualitas pengelolaan induk dan teknik pembenihan yang telah memberikan hasil optimal serta meningkatkan monitoring kualitas air dan kesehatan ikan secara berkala untuk menjaga tingkat kelangsungan hidup benih. Pada BPBAP Situbondo yaitu melakukan proses pemeliharaan bisa berjalan secara optimal sehingga mendukung peningkatan produksi. Sedangkan pada BPIU2K Karangasem yaitu mengoptimalkan fasilitas dan sarana yang masih bisa digunakan untuk menunjang proses pemeliharaan dan pemijahan benih ikan air laut.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW I pada indikator produksi benih ikan air laut di UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp. 106.900.000 (15,67%) dari pagu Rp 682.232.000
- BPBL Batam: Rp. 107.235.000 (36,47%) dari pagu Rp. 294.004.000
- BPBAP Situbondo: Rp. 859.252.105 (51,22%) dari pagu Rp 1.677.600.000
- BPBL Takalar: Rp. 28.500.000 (0%) dari pagu Rp. 126.000.000
- BPBL Lombok: Rp. 7.555.500 (22,61%) dari pagu Rp. 126.000.000
- BPBL Ambon: Rp. 71.060.000 (36,26%) dari pagu Rp. 196.000.000
- BPIU2K Karangasem: Rp. 61,153.390 (57,98%) dari pagu Rp. 105.465.000

Total anggaran yang terserap pada TW I pada indikator produksi benih ikan air laut di UPT mencapai Rp 1.241.655.995 (38,71%) dari pagu Rp 3.207.301.000.

IKSK 4. Produksi Benih Kepiting di UPT

Salah satu indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Induk dan Benih adalah produksi benih kepiting di UPT. Metode perhitungan pada indikator ini yaitu posisi akhir yakni jumlah benih yang dihasilkan untuk penjualan PNPB dan untuk dipelihara menjadi calon induk oleh Unit Pelaksana Teknis. Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPAP Jepara.

Target indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 341,622 ekor dengan target untuk triwulan II yaitu 85,406 ekor.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi benih kepiting di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Kepiting di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Benih Kepiting di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	0	341.622	85.406	86,503	101,28	25,32

Capaian triwulan II pada indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT yaitu 86,503 ekor, dengan prosentase triwulan mencapai 101.28% dan tahunan mencapai 25.32%.

- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi benih kepiting di UPT merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Adapun rincian capaian pada indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Produksi Benih Kepiting di UPT Tahun 2026

No	Nama UPT Ditjen PB	Target Ekor		Realisasi Triwulan II	Prosentase (%)	
		Tahunan	Triwulan II		Tahunan	Triwulan I
1	BBPBL Jepara	341.622	85.406	86.503	25,32	101,28
TOTAL		341.622	85.406	86.503	25,32	101,28

Hasil evaluasi dan kendala atas indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT pada triwulan II mencapai 86,503 ekor, dengan prosentase triwulan mencapai 101.28% dan tahunan mencapai 25.32%. Kendala yang di hadapi oleh BBPBAP Jepara yaitu masih menunggu penganggaran BLU dan tingkat kematian masih cukup tinggi yang disebabkan kanibalisme saat memasuki fase crablet.

- Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Tindak lanjut dari indikator kinerja diatas yakni koordinasi dengan PPK terkait ketersediaan anggaran dan mengurangi padat tebar dan menambah shelter untuk mengurangi kanibalisme. Rekomendasi atas kendala yaitu perbaikan manajemen kualitas air dan pakan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Realisasi anggaran pada BBPBAP Jepara. Sebagai satker pelaksana indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT pada triwulan II belum ada capaian dari pagu anggaran Rp 219,635,000.

IKSK 5. Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT

Salah satu indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Produksi adalah produksi ikan konsumsi di UPT. Timja Produksi mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis menjadi pelaksana yaitu BPBAP Situbondo.

Target indikator kinerja produksi ikan konsumsi air laut di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 25.000 Kg dengan target untuk triwulan II yaitu 0.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi ikan konsumsi air laut di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	0	25.000	0	0	0	0

Indikator kinerja Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT BPBAP Situbondo pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi (0%). Hal ini disebabkan kegiatan masih dalam tahap persiapan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana, ketersediaan benih, serta penyusunan jadwal operasional budidaya. Pelaksanaan kegiatan produksi direncanakan dimulai pada Triwulan III Tahun 2026 sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan siklus produksi.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi ikan konsumsi air laut di UPT merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa beberapa tahapan belum dapat dilaksanakan secara optimal pada Triwulan II tahun 2026. Progres pemeliharaan hingga Triwulan II terdapat kendala sebagai berikut:

- A. Lobster

- MHD (Milky Hemolymph Disease) dan Parasit, dan telah dilakukan pengujian Laboratorium.

- B. Kerapu Cantang

- Pada pemeliharaan kerapu cantang terindikasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan parasit dan telah dilakukan upaya pengobatan, serangan ini dimungkinkan akibat pengaruh kondisi cuaca dingin.

- C. Kakap Putih

- Kurang SDM untuk kegiatan pembesaran ikan kakap putih sesuai dengan beban target produksi yang cukup tinggi.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mempercepat proses pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung kesiapan produksi;
 - b. Melakukan koordinasi intensif dengan penyedia benih untuk memastikan ketersediaan sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan produksi secara lebih rinci dan realistis sesuai kondisi lapangan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan sumber daya manusia yang tersedia di UPT BPBAP Situbondo

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan produksi ikan konsumsi air laut pada Triwulan III Tahun 2026 sesuai dengan rencana yang telah disesuaikan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Realisasi Anggaran kegiatan Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT BPBAP Situbondo sebesar Rp11.687.000.000 (Sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), belum terealisasi (0%) sampai dengan akhir pada akhir Triwulan II Tahun 2026, dikarenakan kegiatan masih dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

IKSK 6. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Salah satu indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Induk dan Benih adalah benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat. Metode perhitungan pada indikator ini yaitu posisi akhir yakni jumlah benih ikan yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPBL Lampung, BPBAP Ujung Batee, BPBL Batam, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, BPBL Ambon, dan BPIU2K Karangasem.

Target indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 4,560,469 ekor dengan target untuk triwulan II yaitu 1,162,195 ekor.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan Ke Masyarakat				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
925.850	1.434.850	4.560.469	1.162.195	1.706.800	146.86	37,43

Pada tabel diatas realisasi pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat sudah terlaksana dengan baik dimana realisasi mencapai 1,706,800 ekor atau 146.86% dari target triwulan II, hal tersebut sudah memenuhi target triwulan II pada indikator tersebut.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada TW II tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TW II Tahun 2025, hal ini mengindasikan semakin optimalnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui bantuan benih ikan air laut yang mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan realisasi dari TW II tahun 2025 ke TW II Tahun

2026 adalah sebesar 780.950 ekor atau sebesar 84,35% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi dan kendala atas indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan II sudah mencapai target yang ditentukan dengan volume 1,706,800 ekor atau 37.43% dari target tahunan yaitu 4,560,469 ekor dan 146.86% dari target triwulan II yaitu 1,162,195 ekor, sehingga dalam proses pelaksanaan indikator berjalan dengan baik. Berdasarkan capaian diatas jumlah penerima bantuan benih ikan air laut pada masing-masing satker yaitu BBPBL Lampung total 30 kelompok, BPBAP Ujung Batee total 7 kelompok, BPBL Batam total 31 kelompok, BPBL Lombok total 12 kelompok, BPBL Ambon total 7 kelompok, dan BPIU2K Karangasem total 2 kelompok.

Tabel 11. Realisasi dan capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat

No	Nama UPT Ditjen PB	Target Ekor		Realisasi Triwulan II	Prosentase (%)	
		Tahunan	Triwulan II		Tahunan	Triwulan I
1	BBPBL Lampung	1.324.831	350.000	567.500	42,84	162,14
2	BPBAP Ujung Batee	217.388	67.388	139.000	63,94	206,27
3	BPBL Batam	987.558	195.000	198.800	20,13	101,95
4	BPBAP Takalar	49.018	19,807	50.000	102,00	252,44
5	BPBL Lombok	692.699	229.000	245.500	35,44	107,21
6	BPBL Ambon	1.088.624	200.000	304.000	27,93	152,00
7	BPIU2K Karangasem	200.351	101.000	202.000	100,82	200,00
TOTAL		4.560.469	1.162,195	1.706.800	37,43	146,86

Kendala yang dihadapi pada BBPBL Lampung yaitu distribusi yang tidak merata secara geografis dan monitoring pasca-penyaluran yang belum optimal, sehingga tingkat keberhasilan pemanfaatan benih di masyarakat belum sepenuhnya terukur. Pada BPBAP Ujung Batee yaitu masih menunggu usulan bantuan dari masyarakat. Kendala pada BPBL Batam yaitu sarana hatchery mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dipakai untuk produksi. Sedangkan kendala pada BPIU2K Karangasem yaitu terbatasnya jumlah kelompok yang melakukan kegiatan di budidaya kerang abalone dan tiram mutiara yang ada di sekitar wilayah bali, sehingga belum optimalnya pengajuan usulan dari masyarakat.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang dapat dilakukan pada kendala yang dihadapi antara lain BBPBL Lampung yaitu meningkatkan sistem perencanaan distribusi berbasis wilayah prioritas agar penyaluran lebih merata dengan memeriksa kelengkapan administrasi proposal yang masuk, seperti kelengkapan kartu KUSUKA dan BPJS serta monitoring pasca bantuan dilakukan pada kelompok yang mendapatkan bantuan tahun 2025 (akhir tahun). Pada BPBAP Ujung Batee yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam sosialisasi dan usulan bantuan benih ikan air laut. Pada BPBL Batam belum terdapat tindak lanjut karena membutuhkan biaya yang besar untuk rehab *hatchery*. Sedangkan pada BPIU2K Karangasem melakukan berkoordinasi dengan penyuluh yang ada di wilayah bali terkait adanya/terbentuknya kelompok pembesaran tiram dan abalone.

Rekomendasi atas kendala rencana aksi pada BBPBL Lampung yaitu BPBAP Ujung Batee yaitu melakukan alternatif penggantian komoditi benih yang ada pada Balai Ujung Batee sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada BPBL Batam yaitu memaksimalkan *hatchery* lainnya dan menyalurkan bantuan dengan ukuran yang lebih kecil agar siklus produksi lebih cepat. Sedangkan pada BPIU2K Karangasem yaitu mendorong para kelompok pembudidaya untuk mencoba mengembangkan abalone dan tiram mutiara. Selain itu juga satker melanjutkan proses produksi benih ikan air laut untuk dipergunakan sebagai bantuan benih ikan air laut ke kelompok masyarakat.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW II pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp. 2.661.490.587 (48,76%) dari pagu Rp 5.458.322.000
- BPBAP Ujung Batee: Rp. 714.205.386 (78,29%) dari pagu Rp 912.276.000
- BPBL Batam: Rp. 3.968.943.000 (52,63%) dari pagu Rp. 3.968.943.000
- BPBAP Takalar: Rp. 168.537.820 (80,19%) dari pagu Rp 210.164.000
- BPBL Lombok: Rp. 1.747.801.854 (59,39%) dari pagu Rp 2.942.946.000
- BPBL Ambon: Rp. 2.362.234.444 (50,97%) dari pagu Rp. 4.634.955.000
- BPIUUK Karangasem: Rp. 407.996.964 (47,72%) dari pagu Rp 855.050.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat adalah sebesar Rp. 10.151.082.349 dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.982.656.000 atau mencapai 53,48% anggaran terserap.

IKSK 7. Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Salah satu indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Induk dan Benih adalah benih kepiting yang disalurkan ke

masyarakat. Metode perhitungan pada indikator ini yaitu posisi akhir yakni jumlah benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BPBAP Takalar.

Target indikator kinerja benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Takalar pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 448,658 ekor dengan target untuk triwulan II yaitu 246,762 ekor.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan Ke Masyarakat				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
125.000	175.000	448.658	246.762	300.000	121,57	66,87

Pada tabel diatas realisasi pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat mencapai 300,000 ekor dengan prosentase 121.57% pada target triwulan II dan 66.87% pada target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada TW II tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TW II Tahun 2025, hal ini mengindasikan semakin optimalnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui bantuan benih kepiting yang mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan realisasi dari TW II tahun 2025 ke TW II Tahun 2026 adalah sebesar 175.000 ekor atau sebesar 140% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi dan kendala atas indikator kinerja benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan II sudah mencapai target yang ditentukan

dengan volume 300,000 ekor. Kelompok penerima pada bantuan tersebut berjumlah 2 kelompok.

Kendala yang dihadapi pada produksi benih kepiting untuk bantuan benih kepiting kepada masyarakat yaitu fluktuasi suhu media pemeliharaan menyebabkan pertumbuhan larva belum optimal dan dapat memengaruhi proses molting; produksi pakan alami (*Chlorella* dan *rotifer*) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan larva pada setiap stadia sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan benih; ketersediaan pakan alami terkadang mengalami penurunan akibat adanya gangguan pada kultur, sehingga diperlukan sumber pakan alternatif untuk menjaga kontinuitas pemeliharaan; dan kualitas benih yang akan disalurkan sangat dipengaruhi oleh kestabilan kondisi media pemeliharaan dan ketersediaan pakan selama proses pembenihan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang dilakukan dalam proses bantuan benih kepiting di lapangan yaitu mengoptimalkan suhu media pemeliharaan dengan pemasangan *heater* dan melakukan pemantauan suhu secara rutin sehingga suhu tetap berada pada kisaran optimal untuk pertumbuhan dan *molting* larva; meningkatkan produksi kultur *Chlorella* dan rotifer melalui penambahan volume kultur, pemupukan sesuai standar operasional, pengaturan pencahayaan, dan pengelolaan kualitas air sehingga kebutuhan pakan alami lebih terjamin; menyediakan pakan cadangan sebagai antisipasi apabila produksi pakan alami belum mencukupi kebutuhan harian larva sehingga proses pemeliharaan tetap berjalan optimal; dan melakukan pemantauan pertumbuhan dan kondisi larva secara berkala sebagai dasar evaluasi sebelum benih disalurkan kepada masyarakat.

Rekomendasi atas kendala rencana aksi bantuan benih kepiting yaitu mempertahankan sistem pengendalian suhu media pemeliharaan agar tetap stabil selama proses pembenihan; meningkatkan kapasitas produksi kultur *Chlorella* dan rotifer melalui penambahan wadah kultur serta pemeliharaan kultur cadangan sehingga ketersediaan pakan alami lebih berkelanjutan; menjaga ketersediaan stok pakan cadangan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan produksi pakan alami; melakukan monitoring kualitas air dan kesehatan larva secara berkala untuk menghasilkan benih yang sehat dan berkualitas sebelum disalurkan kepada masyarakat; dan meningkatkan pencatatan (*recording*) proses produksi dan hasil pemeliharaan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan mutu benih pada periode berikutnya. Sedangkan rekomendasi terkait usulan bantuan yaitu berkoordinasi terkait usulan CPCL dan melanjutkan proses produksi benih kepiting untuk dipergunakan sebagai bantuan benih kepiting ke kelompok masyarakat.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Realisasi anggaran pada indikator kinerja benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan II pada BPBAP Takalar yaitu Rp 91.418.670 (28,34%) dari pagu anggaran Rp 322,540,000.

IKSK 8. Sampel Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

Indikator Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan merupakan jumlah sampel yang terdiri dari sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang dilakukan oleh 4 UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok. Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 1.842 sampel dan pada triwulan II sebanyak 941 sampel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
3.645	7.449	1.842	941	1.285	136,55	69,76

Berdasarkan tabel diatas pada penghitungan realisasi, capaian sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium sebesar 1.285 sampel atau mencapai 136,55% terhadap target triwulan II dan 69,76% dari target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan pada TW II tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TW II Tahun 2025. Penurunan realisasi dari

TW II tahun 2025 ke TW II Tahun 2026 adalah sebesar 2.360 sampel atau sebesar 64,75% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026. Namun secara target TW II Tahun 2026 sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi capaian indikator kinerja sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel) diperoleh dari 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPBL Ambon. Secara keseluruhan, kegiatan telah berjalan, namun masih diperlukan percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan II Tahun 2026

No	Nama Laboratorium	Target Tahunan UPT	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	BPBL Batam	360	207	57,50
2	BBPBL Lampung	200	395	197,50
3	BPBL Lombok	582	339	58,25
4	BPBL Ambon	700	344	49,14
Total		1,842	1.285	69,76

BBPBL Lampung mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 395 sampel atau 197,50% dari target, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, BBPBL Lombok merealisasikan 339 sampel atau 58,25%, BPBL Batam sebanyak 207 sampel atau 57,50%, dan BPBL Ambon sebanyak 344 sampel atau 49,14%. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan laboratorium telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kinerja pada beberapa UPT untuk mencapai target tahunan secara optimal.

Tabel 15. Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Laut dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel)” Berdasarkan Ruang Lingkup Triwulan I Tahun 2026.

No	UPT DJPB	Target	Ruang Lingkup					Total	%
			Kualitas Air	Mikrobiologi	Patologi	Biologi Molekuler	Residu		
1	BBPBL Lampung	200	395	0	0	0	0	395	76,00
2	BPBL Batam	360	207	0	0	0	0	207	45,00
3	BPBL Lombok	582	215	51	28	45	0	339	32,13
4	BPBL Ambon	700	288	29	0	27	0	344	23,71
Total		1.842	1.105	80	18	72	0	1.285	36,21

Berdasarkan ruang lingkup pengujian, pelayanan laboratorium hingga Triwulan II Tahun 2026 didominasi oleh pengujian kualitas air dengan realisasi sebanyak 1.105 sampel. Selain itu, telah dilakukan pengujian mikrobiologi (non-AMR) sebanyak 80 sampel, biologi molekuler sebanyak 72 sampel, dan patologi sebanyak 28 sampel, sedangkan pengujian residu belum dilaksanakan pada periode pelaporan.

BBPBL Lampung dan BPBL Batam melaksanakan pengujian yang seluruhnya berada pada ruang lingkup kualitas air, sedangkan BBPBL Lombok dan BPBL Ambon telah melaksanakan pengujian yang lebih beragam, meliputi kualitas air, mikrobiologi (non-AMR), biologi molekuler, dan patologi. Perbedaan ruang lingkup pengujian tersebut mencerminkan penyesuaian terhadap kapasitas laboratorium, jenis layanan yang tersedia, serta kebutuhan pengujian di masing-masing UPT.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi pengujian sampel ikan air laut dalam rangka pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan telah mencapai 1.285 sampel atau 69,76% dari target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan rencana aksi. Kendala tersebut antara lain belum meratanya jumlah sampel yang diterima oleh masing-masing UPT, belum terlaksananya seluruh ruang lingkup pengujian laboratorium, khususnya pengujian residu, serta masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada sebagian besar UPT. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengujian di beberapa laboratorium masih difokuskan pada ruang lingkup tertentu sesuai kapasabilitas laboratorium, ketersediaan sampel, dan dukungan anggaran.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada UPT yang capaian fisik dan penyerapan anggarannya masih rendah melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, peningkatan koordinasi dalam penyediaan dan distribusi sampel, serta penguatan kapasitas pelayanan laboratorium sesuai ruang lingkup pengujiannya. Selain itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar seluruh ruang lingkup pengujian dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai target, sehingga capaian kinerja pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW IV dari masing-masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp. 4.509.000 (8,53%) dari pagu Rp. 52.849.000
- BPBL Batam sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 120.000.000
- BPBL Ambon sebesar Rp. 88.716.160 (35,33%) dari pagu Rp. 251.102.000
- BPBL Lombok sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 205.200.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan adalah sebesar Rp. 93.225.160 dari pagu anggaran sebesar Rp. 629.151.000 atau mencapai 16,54% anggaran terserap. Meskipun capaian pengujian sampel telah mencapai 69,76% dari target tahunan, penyerapan anggaran masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan pengujian masih memanfaatkan sumber daya laboratorium yang tersedia atau pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran masih akan diintensifkan pada semester berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian proses administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran pada masing-masing UPT agar target kinerja dan penyerapan anggaran hingga akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

IKSK 9. Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT

Indikator Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan hasil evaluasi terhadap laporan monitoring produksi pakan alami di UPT Laut lingkup DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBL Ambon dan BPBAP Situbondo. Indikator Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT memiliki target tahunan sebesar 4 Laporan dan pada triwulan I sebanyak 1 Laporan.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	0	4	2	2	100	50

Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT Capaian kinerja pada triwulan II telah terpenuhi yaitu sebanyak 2 laporan monitoring produksi pakan alami di 5 (lima) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBL Ambon dan BPBAP Situbondo.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Pakan pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan monitoring produksi pakan alami di UPT Laut lingkup DJPB secara keseluruhan dinilai sudah sangat baik karena seluruh UPT telah melaporkan kegiatan budi daya pakan alami guna mendukung kegiatan pembenihan ikan laut sesuai dengan format yang telah disepakati pada rapat koordinasi sebelumnya. Kendala atas rencana aksi sampai dengan triwulan II belum ditemukan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Terkait dengan koordinasi untuk triwulan selanjutnya perlu dilakukan secara berkala guna membahas perkembangan produksi pakan alami dan kendala yang dihadapi oleh UPT serta meningkatkan sinergitas antara Timja Pakan Ikan laut dalam memperdalam pengetahuan terkait produksi pakan alami. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan webinar 'Optimalisasi Pakan Alami untuk Mendukung Keberhasilan Budidaya Ikan Laut Berkelanjutan dan rekapitulasi produksi pakan alami di UPT.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Indikator kinerja Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT yang dilaksanakan oleh Timja Pakan Ikan Laut sampai dengan saat ini tidak ada alokasi anggaran dalam kegiatan tersebut.

IKSK 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun

Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut merupakan dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) yang disusun oleh Tim Kerja di Direktorat Ikan Air Laut yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI), Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, serta Petunjuk Teknis maupun Kajian yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan budi daya ikan air laut.

Target Rekomendasi Kebijakan yang akan dihasilkan pada Tahun 2026 sebanyak 3 (tiga) (Rekomendasi Kebijakan) dan pada triwulan I belum terdapat target capaian karena pengukuran indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun sebagaimana terlihat pada dibawah ini.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	6	3	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas pada penghitungan realisasi, masih belum ada capaian indikator kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut pada triwulan II dikarenakan indikator ini dilakukan pengukuran kinerja pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut merupakan indikator yang diukur pada akhir tahun sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Laut merupakan dokumen

Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) yang disusun oleh Tim Kerja lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) judul, yaitu:

- a) Deteksi iridovirus pada ikan dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR),
- b) Pembesaran Ikan Kakap Putih (*Lates calcarifer*, Bloch 1790), dan
- c) Pembesaran ikan bawal bintang (*Tracchinatus blochii* Lacepede) di karamba jaring apung (KJA).

Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut dilakukan selama 1(satu) tahun berjalan dan dapat dilaporkan hingga pada Triwulan II masih dalam tahap proses sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Tahapan proses yang telah dilakukan yaitu RSNI 2 pada tanggal 21 – 22 Mei 2026 dan RSNI 3 pada tanggal 17 – 20 Juni 2026 atas ketiga judul yang diajukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, telah dilaksanakan Rapat RSNI 2 dan RSNI 3 yang dilakukan secara hybrid dan menghasilkan dokumen. Tindak lanjut terhadap hasil tersebut yaitu Jajak Pendapat. Pada tahapan ini, BSN akan mempublikasikan RSNI 3 secara luas kepada masyarakat umum melalui sistem *e-balloting* untuk mendapatkan masukan, kritik, atau saran.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut atas kegiatan ini adalah koordinasi lanjut dengan BSN untuk mendapatkan hasil Jajak Pendapat oleh BSN hingga RSNI ditetapkan menjadi SNI.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Realisasi anggaran pada indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut yang disusun adalah sebesar 66,31% yaitu sebesar Rp. 123.944.560 dari total pagu anggaran Rp. 186.918.000.

IKSK 11. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji merupakan sampel monitoring pasif dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan gejala penyakit yang ditemukan atau sesuai yang direncanakan/diminta bila tidak ada gejala penyakit. Sampel yang diambil tidak hanya terkait dengan komoditas ikan saja namun juga meliputi pakan, air dan sedimen yang juga dapat menjadi media pembawa penyakit ikan air payau. Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan.

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah sampel hasil kegiatan monitoring penyakit ikan air laut yang dilakukan oleh BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPBL Ambon yang diuji di laboratorium. Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 340 sampel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
58	99	340	175	249	142,25	73,24

Berdasarkan tabel diatas Pada penghitungan realisasi, capaian sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji sebesar 249 sampel atau mencapai 142,25%, terhadap target tw II sedangkan capaian tahunan mencapai 73,24% terhadap target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator sampel monitoring penyakit ikan air laut pada TW II tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TW II Tahun 2025, hal ini mengindasikan semakin optimalnya pelayanan laboratorium UPT DJPB khususnya dalam pelayanan pengujian penyakit ikan air laut yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan realisasi dari TW II tahun 2025 ke TW II Tahun 2026 adalah sebesar 191 sampel atau sebesar 329,31% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja monitoring penyakit ikan air laut menunjukkan bahwa dari target tahunan sebanyak 340 sampel, hingga akhir periode pelaporan telah berhasil diuji sebanyak 249 sampel atau mencapai 73,24% dari target. Secara umum, BPBL Batam mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 57 sampel atau 95,00% dari target, diikuti BPBL Ambon dengan 43 sampel (71,67%), BBPBL Lampung dengan 109 sampel (68,13%), dan BPBL Lombok dengan 40 sampel (66,67%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring penyakit ikan air laut telah berjalan dengan baik dan

telah melampaui proporsi target semester pertama, meskipun masih diperlukan percepatan pada beberapa UPT agar target tahunan dapat dicapai secara optimal., rincian ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 19. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji UPT
DJPB di Triwulan II Tahun 2026**

No	Nama Laboratorium	Target Tahunan UPT	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	BPBL Batam	160	57	95,00
2	BBPBL Lampung	60	109	68,13
3	BPBL Lombok	60	40	66,67
4	BPBL Ambon	60	43	71,67
Total		340	249	73,24

Pada triwulan II tahun 2026 penyakit ikan yang dilakukan monitoring oleh UPT Ikan Air Laut antara lain *Trichodiniasis*, *Viral Nervous Necrosis (VNN)*, *Infection with Megalocytivirus*, *Infection with White Spot Syndrome Virus (WSSV)*, *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)*, *Vibriosis*, *Milky Haemolymph Disease*, *Grouper Sleepy Disease Iridovirus (GIV)*, dan *Hepatopancreatic Microsporidiosis (EHP)*.

Jenis ikan yang dimonitoring penyakit nya meliputi bawal bintang, kakap putih, kerapu bebek, kerapu cantang, ikan badut, kuda laut, kuwe, nila, udang vaname, dan lobster pasir. Komoditas tersebut merepresentasikan kelompok ikan laut, ikan air tawar, krustasea, serta biota laut yang memiliki nilai ekonomi maupun konservasi, sehingga menjadi sasaran kegiatan surveilans dan pengujian kesehatan dalam rangka mendukung pengendalian penyakit, menjamin kesehatan komoditas budidaya, serta meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya.

Berdasarkan hasil pengujian, penyakit ikan yang ditemukan positif adalah *Trichodiniasis*, *Vibriosis*, *Viral Nervous Necrosis (VNN)*, dan *Infection with Megalocytivirus* sedangkan untuk penyakit lain yang dilakukan monitoring menunjukkan hasil negatif.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan Monitoring Penyakit Ikan Air Laut telah menunjukkan perkembangan yang baik dengan capaian pengujian sebesar 73,24% dari target tahunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan rencana aksi, antara lain belum meratanya capaian antar-UPT, perbedaan ketersediaan sampel di masing-masing wilayah, serta belum optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa UPT. Selain itu, penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat efisiensi anggaran masih berdampak pada terbatasnya kegiatan monitoring penyakit secara aktif, terutama dalam hal frekuensi kunjungan, cakupan

wilayah pemantauan, dan jumlah sampel yang dapat dikumpulkan pada beberapa lokasi.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan monitoring pada UPT yang capaian fisik maupun penyerapan anggarannya masih rendah melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, penguatan koordinasi antara Direktorat Ikan Air Laut dengan UPT pelaksana, serta penyusunan jadwal monitoring yang lebih efektif berdasarkan tingkat risiko penyakit dan ketersediaan sampel di lapangan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan monitoring berjalan sesuai rencana sehingga target kinerja dan penyerapan anggaran Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW IV dari masing-masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp.134.589.800 (16,72%) dari pagu Rp. 217.700.000
- BPBL Batam sebesar Rp. 1.270.000 (2,11%) dari pagu Rp. 60.291.000
- BPBL Ambon sebesar Rp. 44.349.112 (62,08%) dari pagu Rp. 71.436.000
- BPBL Lombok sebesar Rp. 2.050.000 (2,73%) dari pagu Rp 75.000.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator Sampel monitoring penyakit ikan air laut adalah sebesar Rp. 182.258.912 dari pagu anggaran sebesar Rp. 424.427.000 atau mencapai 42,94% anggaran terserap.

IKSK 12. Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji

Indikator Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloxacin.

Target indikator kinerja sampel monitoring surveillance AMU/AMR yang diuji di Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 sebesar 216 sampel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
67	90	216	117	146	124,78	67,59

Indikator Pengujian sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji untuk komoditas ikan air laut dilaksanakan di 4 UPT- DJPB yaitu di BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok, pada triwulan II terdapat realisasi pengujian sampel AMR sebanyak 146 sampel atau sebesar 124,78% dari target triwulan II dan 67,59% dari target tahunan sebesar 216 sampel.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji pada TW II tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TW II Tahun 2025, hal ini mengindasikan semakin optimalnya Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan realisasi dari TW II tahun 2025 ke TW II Tahun 2026 adalah sebesar 79 sampel atau sebesar 117,91% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji (sampel) diperoleh dari 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPBL Ambon.

Capaian indikator kinerja sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji pada Triwulan II Tahun 2026 oleh UPT Ikan Air Laut menunjukkan bahwa dari total target tahunan sebanyak 216 sampel, telah berhasil direalisasikan sebanyak 146 sampel atau mencapai 67,59%. Capaian tertinggi dicapai oleh BBPBL Lampung dengan realisasi 55 sampel (73,33%), diikuti BPBL Batam sebanyak 44 sampel (66,67%), BPBL Ambon sebanyak 33 sampel (66,00%), dan BPBL Lombok sebanyak 14 sampel (56,00%). Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, meskipun masih diperlukan percepatan pada beberapa UPT untuk mencapai target tahunan secara optimal.

Tabel 21. Rincian target dan realisasi sampel survailan resistensi antimikroba Triwulan II Tahun 2026 di 4 UPT-DJPB

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target Sampel (Tahunan)	Realisasi Triwulan II	Prosentase (%)
1	BPBL Batam	75	55	73,33
2	BBPBL Lampung	66	44	66,67
3	BPBL Lombok	25	14	56,00
4	BPBL Ambon	50	33	66,00
Total		216	146	67,59

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
1	BBPBL Lampung	75	Kerapu	25	8
			Kakap	25	23
			Bawal	25	24
2	BPBL Batam	66	Kerapu	16	10
			Kakap	32	18
			Bawal	18	16
3	BPBL Lombok	25	Kakap	12	4
			Bawal	13	10
4	BPBL Ambon	50	Kakap	20	12
			Kuwe	30	21
Total				216	146

Berdasarkan komoditas target, realisasi pengambilan sampel menunjukkan capaian yang bervariasi pada masing-masing UPT. Secara umum, komoditas bawal menunjukkan capaian tertinggi, yaitu 96,00% di BBPBL Lampung, 88,89% di BPBL Batam, dan 76,92% di BPBL Lombok. Sementara itu, komoditas ikan kuwe di BPBL Ambon telah mencapai 70,00%. Adapun capaian pengambilan sampel komoditas kakap dan kerapu masih bervariasi, dengan beberapa UPT belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan sampling, khususnya pada

komoditas kerapu dan kakap, guna mendukung pencapaian target Monitoring Surveilans AMU/AMR Tahun 2026.

Sampel AMR tersebut dilakukan identifikasi bakteri untuk mendapatkan isolate bakteri target dan jika ditemukan bakteri targetnya, maka pengujian dilanjutkan ke pengujian *Antimicrobial Sensitivity Test* (AST) dengan menggunakan metode agar disk difusi. Metode ini bertujuan untuk menentukan apakah bakteri target sensitif, intermediate atau resisten terhadap antibiotik yang digunakan dalam pengujian.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut, salah satunya adalah adanya efisiensi anggaran yang berdampak langsung terhadap kegiatan operasional di lapangan. Keterbatasan anggaran tersebut berimplikasi pada berkurangnya intensitas kegiatan sampling, terbatasnya mobilisasi tim pelaksana, serta penyesuaian jumlah dan frekuensi kunjungan ke lokasi budi daya.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pengambilan sampel pada komoditas dan UPT yang capainya masih di bawah target melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, penguatan koordinasi antara Direktorat Ikan Air Laut dengan seluruh UPT pelaksana, serta peningkatan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian fisik dan penyerapan anggaran. Selain itu, penyusunan jadwal sampling yang lebih efektif dengan mempertimbangkan ketersediaan komoditas budidaya diharapkan dapat mendukung pencapaian target Monitoring Surveilans AMU/AMR Tahun 2026 secara optimal.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan Monitoring Surveilans AMU/AMR telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan capaian fisik sebesar 67,59% dari target tahunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan rencana aksi, antara lain belum meratanya capaian pengambilan sampel antarUPT, keterbatasan ketersediaan komoditas target di beberapa wilayah, serta masih rendahnya penyerapan anggaran pada sebagian UPT. Selain itu, penyesuaian pelaksanaan kegiatan sebagai dampak efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan sampling di beberapa lokasi harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan dukungan anggaran yang tersedia.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW II pada Sampel Monitoring Surveilans AMU/AMR yang diuji di masing masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp. 1.761.000 (4,52%) dari pagu Rp. 38.934.000

- BPBL Ambon sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 32.949.000
- BPBL Batam sebesar Rp. 20.324.510 (51,59%) dari pagu Rp. 39.399.000
- BPBL Lombok sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 16.474.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk Indikator Sampel Monitoring Surveilans AMU/AMR yang diuji adalah sebesar Rp. 22.085.510 dari pagu anggaran sebesar Rp. 127.756.000 atau mencapai 17,29% anggaran terserap.

IKSK 13. Kawasan Budi Daya Lobster yang Dibangun atau Direvitalisasi

Pelaksanaan Pembangunan atau Revitalisasi Kawasan budi daya lobster yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Laut dilakukan oleh Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam dengan target utama berupa pengembangan produksi lobster. Tim kerja Kawasan Budi Daya Air Laut mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis dari BPBL Batam. Target indikator Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi sebesar 1 unit.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi sebagaimana pada Tabel 22.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Kawasan Budi Daya Lobster Yang Dibangun Atau Direvitalisasi				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	0	1	0	0	0	0

Sesuai pada tabel 225 dapat dilihat bahwa indikator Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi belum terdapat capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi merupakan indikator baru pada Timja Kawasan pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Berdasarkan hasil evaluasi, telah dilaksanakan kegiatan produksi lobster baik pada unit *nursery* dan pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA). Berdasarkan data

keragaan produksi pada modeling budi daya lobster, terlihat bahwa unit *nursery* dan KJA telah dimanfaatkan dan sedang dalam proses produksi.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut atas kegiatan ini adalah melanjutkan kegiatan modeling budidaya lobster yang telah berjalan dan kemungkinan pengembangan skala produksi pada unit tersebut dan menjadikan modeling budi daya lobster di BPBL Batam sebagai bentuk integrasi dan revitalisasi kawasan budi daya.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran kegiatan Pembangunan atau Revitalisasi Budi Daya Lobster berada di Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam dengan PAGU Rp.175.000.000 dan realisasi pada Triwulan II mencapai Rp.143.959.000 (82,26%).

ISK 14. Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Serfikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB dan CPIB)

Indikator Unit usaha yang dilakukan pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan kegiatan pembinaan yang terdiri dari:

- 1) Pembinaan CBIB adalah pembinaan cara budidaya ikan yang baik untuk unit budi daya ikan air laut agar hasil produksi perikanan budidayanya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Pembinaan CBIB dilakukan sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan sertifikasi CBIB ke sistem OSS. Pada saat ini, penerapan CBIB bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021.
- 2) Pembinaan CPIB adalah pembinaan cara pembenihan ikan yang baik yang dilakukan terhadap seluruh unit budi daya ikan air laut yang memproduksi benih ikan sehingga induk dan benih yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

Pembinaan CBIB dan CPIB pada unit budidaya ikan air laut dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sedangkan sertifikasi CBIB dan CPIB dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Direktorat Ikan Air Laut dalam mendukung peningkatan mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan usaha perikanan budi daya. Tim pelaksana kegiatan adalah Tim Kerja Produksi, Direktorat Ikan Air Laut. Indikator kinerja unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi penerapan standar sertifikasi pada unit budidaya ikan laut, sebagai upaya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta peningkatan kinerja tata kelola unit usaha.

Target tahunan Indikator kinerja unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) adalah sebanyak 200 (Unit) dengan rincian 150 unit untuk CBIB dan 50 unit untuk CPIB.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB dan CPIB)

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CPIB dan CBIB)				
2025		2026			% Capaian tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	200	60	60	100	30

Pada tabel diatas realisasi pada triwulan II Tahun 2026 sudah terrealisasi sebesar 60 unit usaha budidaya ikan air laut (30%). Capaian 60 unit pada Triwulan II menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana aksi yang ditetapkan dan menjadi landasan yang baik untuk mencapai target tahunan pembinaan CPIB dan CBIB pada unit usaha budidaya ikan laut. Pembinaan akan terus dilanjutkan pada triwulan berikutnya melalui pendampingan berkelanjutan, monitoring, evaluasi, serta fasilitasi proses sertifikasi bagi unit usaha yang telah memenuhi persyaratan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025**

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan indikator yang diukur tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026, pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) telah menunjukkan perkembangan yang positif. Realisasi pembinaan mencapai 60 unit usaha budidaya ikan air laut atau sebesar 30% dari target tahunan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut didukung oleh optimalnya koordinasi antara Direktorat Ikan Air Laut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyuluh perikanan, serta pelaku usaha budidaya ikan laut. Selain itu, proses identifikasi dan verifikasi calon unit usaha, pelaksanaan sosialisasi standar CPIB dan CBIB, pendampingan teknis, serta pembinaan lapangan telah terlaksana secara efektif sehingga mampu meningkatkan kesiapan unit usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Masih terdapat unit usaha yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sertifikasi sehingga memerlukan pendampingan lanjutan.
2. Tingkat pemahaman dan penerapan standar CPIB dan CBIB pada sebagian pelaku usaha masih bervariasi, terutama terkait aspek biosekuriti, pencatatan kegiatan budidaya, dan pengelolaan lingkungan.
3. Keterbatasan sumber daya pendamping di beberapa wilayah menyebabkan intensitas pembinaan belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh calon unit usaha.
4. Sebaran lokasi unit usaha yang cukup luas serta kondisi geografis tertentu mengakibatkan pelaksanaan monitoring dan pendampingan lapangan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
5. Penyesuaian jadwal pembinaan dengan siklus produksi dan aktivitas operasional pelaku usaha di beberapa daerah turut memengaruhi kecepatan pelaksanaan pembinaan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi kendala tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan pembinaan melalui penjadwalan yang lebih efektif pada Triwulan berikutnya.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan unit usaha perikanan budi daya agar lebih siap dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.
- c. Mengoptimalkan peran tenaga teknis dan penyuluh perikanan dalam kegiatan pendampingan.
- d. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait CPIB dan CBIB kepada pelaku usaha budidaya ikan air laut

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran kegiatan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) semula sebesar Rp.156.601.000,00 (seratus lima puluh enam

juta enam ratus satu ribu rupiah). Namun, dengan adanya efisiensi anggaran, pagu yang tersedia menjadi sebesar Rp.60.429.000,00 (enam puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bahan/ATK sebesar Rp.15.429.000,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pengadaan benih lobster sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp.44.570.400,00 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99,05%, yang digunakan untuk kegiatan pengadaan benih lobster.

IKSK 15. Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya

Sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Indikator Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan, program kerja, dan kompetensi dalam bidang perikanan budi daya. Dengan tercapainya indikator kinerja tersebut diharapkan penyebaran informasi dapat tersampaikan dengan baik, terimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Target indikator kinerja Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya sebanyak 500 orang.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	0	500	0	0	0	0

Target Indikator Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya pada tahun 2026 yaitu 500 orang dengan perhitungan tahunan. Hingga Triwulan II ini telah dilakukan sosialisasi NSPK bidang perikanan budi daya kepada 641 orang. Namun, capaian ini tidak masuk kedalam capaian triwulan II, karena perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Sosialisasi NSPK Perikanan Budi Daya merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pelaksanaan Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya di triwulan II tidak terdapat kendala dan berjalan lancar. Sosialisasi dilakukan melalui Webinar dengan judul “Optimalisasi Pakan Alami untuk Mendukung Keberhasilan Budidaya Ikan Laut Berkelanjutan”.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi NSPK di triwulan III perlu adanya peningkatan kapasitas zoom agar dapat mengakomodir peserta lebih banyak lagi. Selain itu, juga bisa dengan live streaming melalui *Youtube*.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

IKU Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya tidak memiliki DIPA Anggaran khusus sehingga beberapa kegiatan dilakukan bersamaan dengan anggaran pada kegiatan revitalisasi tambak pantura di Provinsi Jawa Barat ataupun dilakukan secara daring.

SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima. Sasaran Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Ikan Air Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan IV Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Laut yang menjadi objek pengawasan. Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026 memiliki target sebesar 86%.

- **Capaian Kinerja**

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Ikan Air Laut yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026).

Capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
87,50	85	86	86	100	116,28	116,28

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut tercatat sebesar 100,00%. Angka ini melampaui target triwulan maupun target tahunan sebesar 86, dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 116,28%. Capaian ini mencerminkan optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka perbaikan kinerja satuan kerja secara berkelanjutan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Pada triwulan II tahun 2025, capaian realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut mencapai 87,50% sedangkan pada triwulan II Tahun 2026 mencapai 100,00%, dari data tersebut menunjukkan jika dibandingkan pada triwulan II di masing-masing tahun indikator ini mengalami peningkatan sebesar 12,50% sedangkan untuk perbandingan antar tahun belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Sesuai Surat Inspektur III Inspektorat Jenderal Nomor T.276/ITJ.3/HP.510/IV/2026 tanggal 3 April 2026 perihal Hasil Pemantauan Tindak

Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen KKP lingkup DJPB Triwulan I Tahun 2026, Direktorat Ikan Air Laut memiliki beberapa temuan dan saran antara lain:

- 1) Hasil pemantauan kegiatan persiapan revitalisasi eks. tambak udang Pantura Jawa Barat TA. 2025 memiliki 12 Temuan dan 13 Saran dengan nilai keuangan Rp. 0 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 10 temuan dan 11 saran dan masih tersisa 2 temuan dan 2 saran untuk ditindaklanjuti; dan
- 2) Hasil reviu pekerjaan penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Tata Batas dan AMDAL revitalisasi tambak pantura Jawa Barat terdapat 3 temuan, 4 saran dengan nilai keuangan sebesar Rp. 0 dan telah ditindaklanjuti secara tuntas.

Dari penjelasan diatas Pada triwulan I hasil pengawasan tersebut ada yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut dan masih ada temuan dan saran yang tersisa, namun pada triwulan II berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Nomor: B.3692/DJPB.1/TU.140/VII/2026 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB” Triwulan II Tahun 2026 realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut mendapatkan nilai capaian sebesar 100,00% yang berarti temuan dan saran yang tersisa sudah selesai ditindaklanjuti.

Tabel 26. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Direktorat Ikan Air Laut	100,00
2	Direktorat Rumput Laut	100,00
3	Direktorat Ikan Air Tawar	95,41
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	100,00

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 pada level unit kerja, Direktorat Ikan Air Laut memiliki capaian tindak lanjut sebesar 100,00%, yang nilai capaiannya sama dengan 3 Direktorat lain di lingkup DJPB (Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Prasarana dan Sarana dan Direktorat Rumput Laut) dan lebih besar dari Direktorat Ikan Air Tawar yang mendapatkan nilai sebesar 95,41%. Hal ini menunjukkan bahwa satker Direktorat Ikan Air Laut sudah optimal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Ikan Air Laut.

Tidak terdapat kendala Kendala dalam mencapai indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada triwulan II ini.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (%), yaitu melengkapi dokumen dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi berupa saran dan temuan Itjen jika terdapat hal tersebut.

IKSK 17. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut

Indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Ikan Air Laut sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 84,2 (Nilai).

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	84,45	84,2	0	0	0	0

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 84,2 (Nilai) dan pada Triwulan II indikator ini belum bisa dihitung dikarenakan pengukuran indikator dilakukan secara tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 dan 2026 diukur pada akhir tahun sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan I, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi antara lain: Perjanjian Kinerja, Dialog kinerja (cascading), Rencana Aksi, Manual Indikator Kinerja dan dokumen pengukuran kinerja diantaranya: evaluasi rencana aksi dan laporan kinerja. Dokumen tersebut seluruhnya diupload di aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/> sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP. Tidak terdapat kendala dalam mencapai target indikator ini.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi untuk mencapai indikator kinerja adalah a) membuat rencana kinerja Direktorat Ikan Air Laut setiap tahun dengan sebaik-baiknya, b) melaporkan realisasi kinerja dan melakukan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya, c) mendokumentasikan segala dokumen yang berkaitan dengan penilaian mandiri SAKIP dengan baik dan mudah diakses, dan d) melaksanakan penilaian mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mencapai indikator kinerja adalah melakukan penyusunan dokumen kinerja lebih awal agar pengumpulan dokumen yang dilakukan setiap triwulan bisa tepat waktu dan dapat segera diupload dokumen tersebut ke aplikasi aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/>.

IKSK 18. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c) Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja; dan 4) Disiplin.

- 1) Indikator dimensi **kualifikasi** yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan

persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

2) Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi **kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:

- a) Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- b) Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

- 3) Indikator dimensi **kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

- 4) Indikator dimensi **disiplin** yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu

didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 81,5 (Indeks).

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
77,9	81,24	81,5	74	78,6	106,22	96,44

Sesuai pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut memiliki capaian pada triwulan II atau Semester 1 Tahun 2026 yaitu sebesar 78,6 Indeks atau sebesar 106,22% persentasenya jika dibandingkan dengan target triwulan II atau sebesar 96,44% persentasenya jika dibandingkan dengan target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 dan 2026 diukur pada Semester 1 dan Semester 2, pada semester I tahun 2026 ini nilai IP ASN mengalami kenaikan sebesar 0,7 indeks jika dibandingkan dengan semester I tahun 2025 atau 0,89% prosentase kenaikannya, hal ini bisa diartikan bahwa terdapat perbaikan pada semester I tahun 2026 untuk pegawai ASN di Direktorat Ikan Air Laut dalam mengembangkan profesionalitasnya.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Kinerja IP ASN ini memiliki target tahunan sebesar 81,5 (Indeks) yang akan dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara dan pada triwulan II atau semester I ini IP ASN memiliki target sebesar 74 dan telah tercapai sebesar 78,6 atau memiliki kategori **Sedang**.

Tabel 29. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Direktorat Ikan Air Laut	78,60
2	Direktorat Rumput Laut	79,16
3	Direktorat Ikan Air Tawar	80,32
4	Direktorat Ikan Air Payau	80,34
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	82,61

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 pada level unit kerja, Direktorat Ikan Air Laut memiliki capaian IP ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut sebesar 78,60%, yang nilai capaiannya paling rendah dibandingkan dengan 4 Direktorat lain di lingkup DJPB (Direktorat Prasarana dan Sarana, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Tawar dan Direktorat Rumput Laut). Hal ini menunjukkan bahwa satker Direktorat Ikan Air Laut masih perlu meningkatkan nilai indeks profesionalitas untuk pegawai ASN Direktorat Ikan Air Laut.

Dalam mencapai target indikator kinerja IP ASN terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Masih terdapat pegawai yang memiliki nilai IP ASN yang rendah.
2. Beberapa pegawai belum mengetahui cara melakukan sinkronisasi antara aplikasi MyASN dan PortalKKP untuk meningkatkan nilai IP ASN masing-masing pegawai.

• **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Pegawai Direktorat Ikan Air Laut dengan berfokus pada perbaikan nilai kinerja individu maupun unit kerja. Upaya tersebut akan didukung melalui peningkatan kompetensi pegawai, antara lain dengan mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja. Melalui langkah ini, diharapkan kinerja Direktorat Ikan Air Laut dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

IKSK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2026 untuk Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut adalah 81 (nilai).

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	84,27	81	0	0	0	0

Realisasi Indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 dan 2026 diukur pada akhir tahun sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi Indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun dan dalam pelaksanaannya indikator kinerja ini masih terdapat kendala yaitu masih terdapat pegawai yang belum memahami penulisan tata naskah yang benar.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut pada periode selanjutnya adalah a) dilakukan sosialisasi kembali kepada setiap pegawai Direktorat Ikan Air Laut terkait format yang benar dalam penulisan tata naskah, dan b) melakukan proses mendokumentasikan arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah dengan baik di Direktorat Ikan Air Laut

IKSK 20. Persentase Layanan Perkantoran

Indikator Persentase Layanan Perkantoran terdiri penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 4 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur sebagai berikut:

- **Persuratan**

Layanan persuratan yang dilaksanakan adalah berupa pemberian nomor surat yang ditandatangani secara manual.

- **Rapat Offline**

Layanan rapat yang dilaksanakan adalah berupa layanan penyiapan konsumsi peserta rapat dan penyediaan sarana pendukung rapat lainnya.

- **Keuangan**

Layanan yang dilaksanakan berupa:

- a. Berupa dokumen SPJ yang diverifikasi
- b. Dokumen SPJ Perdin rampung
- c. Pengajuan SPM
- d. Pendaftaran kontrak

- **Kepegawaian**

Layanan dari kepegawaian berupa:

- a. Peremajaan SIASN
- b. Layanan Mutasi
- c. Cuti

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Layanan Perkantoran Yang Direalisasikan}}{\text{Target Layanan Perkantoran}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2026 untuk Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran adalah 100 (%).

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan perkantoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Presentase Layanan Perkantoran				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	97,51	100	100	100	100	100

Realisasi Indikator kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100% atau 100% dari target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada tahun 2025 diukur pada akhir tahun sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan II rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 32. Kegiatan Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan	Permintaan	Terlayani	Persentase
1	Persuratan			
	Nomor surat ttd manual	86	86	100%
2	Rapat Offline	59	59	100%
3	Keuangan			
	a. Dokumen SPJ yang diverifikasi	75	75	100%
	b. Dokumen SPJ perdin rampung	33	33	100%
	c. Pengajuan SPM	204	204	100%
	d. Pendaftaran Kontrak (kontrak)	50	50	100%
4	Kepegawaian			
	a. Peremajaan SIASN (pegawai)	8	8	100%
	b. Layanan mutasi (pegawai)			

No	Kegiatan	Permintaan	Terlayani	Persentase
	• Usulan KGB	4	4	100%
	• Usulan Kenaikan Pangkat	2	2	100%
	c. Cuti (pegawai)	37	37	100%
	Jumlah	558	558	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat permintaan layanan perkantoran sebanyak 558 layanan dan telah terealisasi sebanyak 558 layanan, sehingga layanan perkantoran pada TW II di Direktorat Ikan Air Laut sebesar 100%.

Hal ini berdasarkan pada perhitungan persentase layanan perkantoran yang akan menjadi realisasi Indikator kinerja:

$$\text{Persentase Layanan Perkantoran (\%)} = \frac{558}{558} \times 100\% \\ = 100\%$$

Sehingga berdasarkan perhitungan diatas didapatkan nilai persentase layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut sebesar 100%. Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini sesuai dengan target pada triwulan II yaitu sebesar 100% dan dalam pelaksanaannya indikator kinerja ini tidak terdapat kendala.

• Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut terhadap indikator kinerja ini adalah mengoptimalkan layanan perkantoran di Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi lebih baik lagi.

IKSK 21. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level 1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Indikator Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2026. Target tahunan Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP adalah sebesar 100 (%)

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja persentase penyelesaian penyusunan SOP dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2025	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
0	100	100	0	0	0	0

Realisasi Indikator kinerja persentase penyelesaian penyusunan SOP pada triwulan II tahun 2026 belum memiliki capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2026 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut pada Tahun 2026 sudah dalam tahap melakukan penyusunan SOP dan dari proses identifikasi tersebut didapatkan 5 Bidang Kegiatan dimana Direktorat Ikan Air Laut menjadi PIC, bidang kegiatan tersebut antara lain:

3. Pemanfaatan kawasan budi daya perikanan;
4. Standardisasi bidang kesehatan ikan dan lingkungan budi daya;
5. Pengendalian lingkungan budi daya;
6. Rehabilitasi lingkungan budi Daya;
7. Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Indikator ini belum terdapat capaian karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun, kendala yang ada dalam upaya mencapai target ini adalah koordinasi yang belum optimal antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan masing-masing SOP.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk periode selanjutnya adalah a) melanjutkan proses penyelesaian penyusunan draft SOP yang melibatkan Direktorat Ikan Air Laut dan b) menjalankan tugas PIC di bidang kegiatan yang ditunjuk dalam penyusunan draft SOP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya agar koordinasi antar pemangku kepentingan bisa berjalan lancar.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 khususnya Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut pada DIPA Awal adalah sebesar Rp. 403.744.000 dan tidak terdapat pagu blokir namun pada triwulan II terdapat revisi anggaran sehingga alokasi anggaran saat ini adalah sebesar Rp.248,067.000. Realisasi satker Direktorat Ikan Air Laut hingga triwulan II Tahun 2026 khususnya Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut adalah sebesar Rp. 168.514.960 atau sebesar 67,93% dari pagu efektif.

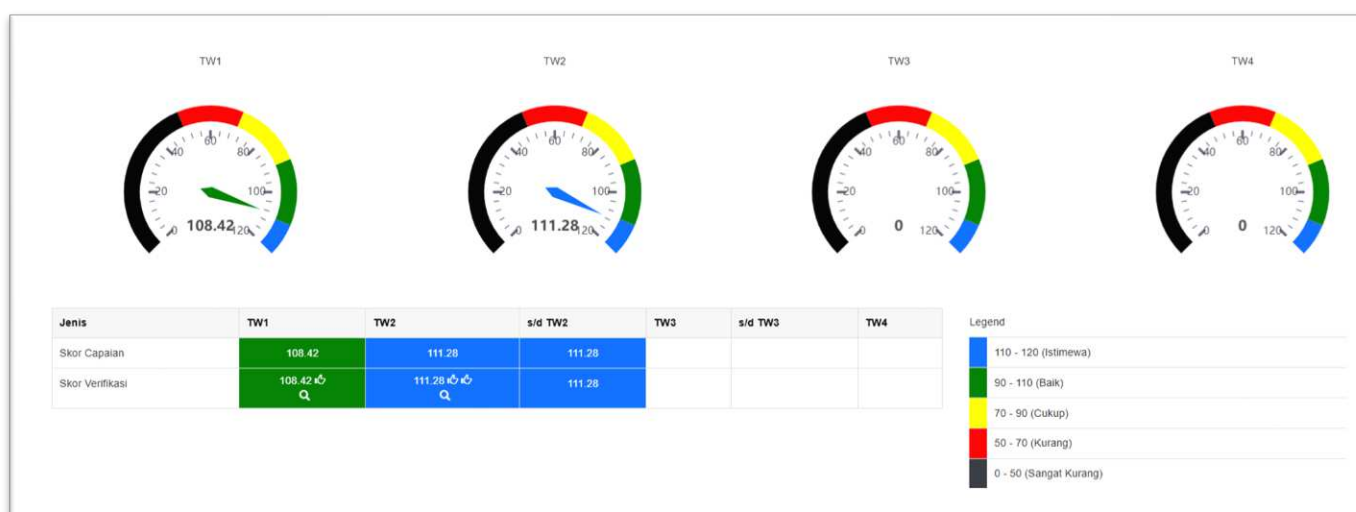
BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Ikan Air Laut merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Ikan Air Laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Laut berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Ikan Air Laut.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode April s.d. Juni 2026. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II tahun 2026, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pendukung sasaran kegiatan, sebanyak 11 (sebelas) Indikator Kinerja telah melampaui target triwulan yang telah ditetapkan atau >100%, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang belum terdapat capaian karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Seluruh capaian Indikator kinerja Tahun 2026 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada mencapai nilai **“ISTIMEWA”** dengan nilai **111,28**.



Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan II Tahun 2026

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan II tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya ada hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No.	Hal Yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Masih terdapat pegawai yang memiliki nilai IP ASN yang rendah.	Mendorong pegawai Direktorat Ikan Air Laut untuk meningkatkan indeks profesionalitas dan mengembangkan kompetensi.
2.	Beberapa pegawai belum mengetahui cara melakukan sinkronisasi antara aplikasi MyASN dan PortalKKP untuk meningkatkan nilai IP ASN masing-masing pegawai.	Melakukan sosialisasi terkait cara penginputan dan sinkronisasi data pegawai pada aplikasi MyASN dan PortalKKP.

LAMPIRAN

Kertas Kerja Verifikasi Triwulan II

KERTAS KERJA VERIFIKASI

Unit Kerja : DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
 Bulan : Juni - 2026
 NKO Awal : 111.28
 NKO Verifikasi : 111.28

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Juni	Capaian Juni	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	IKSK.1	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT Data Dukung1 Data Dukung2	ekor	Maximize	5.612,00	1.565,00	2.292,00	2.292,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 758/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Capaian Indikator Kinerja Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT (ekor) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026
2	IKSK.10	Kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut yang disusun	rekomendasi kebijakan	Maximize	3,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
3	IKSK.11	Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji Data Dukung1 Data Dukung2	Sampel	Maximize	340,00	175,00	249,00	249,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 780/DJPB.4/PB.230/VII/2026 dari Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 9 Juli 2026
4	IKSK.12	Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji Data Dukung1 Data Dukung2	Sampel	Maximize	216,00	117,00	146,00	146,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 779/DJPB.4/PB.240/VII/2026 dari Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang Diuji (Sampel) pada Triwulan II Tahun 2026 tanggal 9 Juli 2026
5	IKSK.13	Kawasan Budi Daya Lobster Yang Dibangun atau Direvitalisasi	unit	Maximize	1,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Juni	Capaian Juni	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
6	IKSK.14	Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB, CPIB) Data Dukung1 Data Dukung2	unit	Maximize	200,00	60,00	60,00	60,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 762/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Ketua Tim Kerja Produksi Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Unit Usaha yang dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CPIB, CBIB) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026
7	IKSK.15	Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya	orang	Maximize	500,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
8	IKSK.2	Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT Data Dukung1 Data Dukung2	ekor	Maximize	5.747,00	1.800,00	1.888,00	1.888,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 759/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT (ekor) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026
9	IKSK.3	Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT Data Dukung1 Data Dukung2	ekor	Maximize	773.771,00	331.501,00	466.066,00	466.066,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 761/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Capaian Indikator Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT (ekor) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026
10	IKSK.4	Produksi Benih Kepiting di UPT Data Dukung1 Data Dukung2	ekor	Maximize	341.622,00	85.406,00	86.503,00	86.503,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 763/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Capaian Indikator Produksi Benih Kepiting di UPT (ekor) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026
11	IKSK.5	Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT	Kg	Maximize	25.000,00	0,00		0,00	Valid	Belum adanya capaian, karena target triwulan II adalah 0

78 |LKJ Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Juni	Capaian Juni	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
12	IKSK.6	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Data Dukung1 Data Dukung2	ekor	Maximize	4.560.469,00	1.162.195,00	1.706.800,00	1.706.800,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 764/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Capaian Indikator Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat (ekor) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026
13	IKSK.7	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat Data Dukung1 Data Dukung2	ekor	Maximize	448.658,00	246.762,00	300.000,00	300.000,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 765/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Capaian Indikator Benih Kepiting yang Disalurkan ke Masyarakat (ekor) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026
14	IKSK.8	Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Data Dukung1 Data Dukung2	Sampel	Maximize	1.842,00	941,00	1.285,00	1.285,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 782/DJPB.4/PB.240/VII/2026 dari Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Sampel Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel) Triwulan II Tahun 2026 tanggal 9 Juli 2026
15	IKSK.9	Monitoring produksi pakan alami di UPT Data Dukung1 Data Dukung2	laporan	Maximize	4,00	2,00	2,00	2,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 784/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan Nota Dinas Nomor 785/DJPB.4/TU.140/VII/2026 dari Katimja Pakan Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT Triwulan II Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026
16	IKSK.02.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Persen	Maximize	86,00	86,00	100,00	100,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Dinas Setditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.3692/DJPB.1/TU.140/VII/2026 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan II Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2026
17	IKSK.02.2	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air	Nilai	Maximize	84,20	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Juni	Capaian Juni	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
18	IKSK.02.3	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Indeks	Maximize	81,50	74,00	78,60	78,60	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Dinas Setditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.3774/DJPB.1/TU.140/VII/2026 Hal Capaian IKU IP-ASN Semester I Tahun 2026 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya tanggal 10 Juli 2026
19	IKSK.02.4	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut	Nilai	Maximize	81,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
20	IKSK.02.5	Persentase Layanan Perkantoran Data Dukung1	Persen	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Laporan Internal Direktorat Ikan Air Laut Hal Capaian Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut tanggal 2 Juli 2026
21	IKSK.02.6	Persentase penyelesaian penyusunan SOP	Persen	Maximize	100,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun

Kesimpulan										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Perwakilan Unit Kerja					Nama		Email		
Tim Verifikasi					Nama		Email		